



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA  
**UNIT KERJA** : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **AMPERA BUDI RIYANTO**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **881582**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **2.405.500.000**

1. Tanah Seluas 968 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 1.380.000.000
2. Tanah Seluas 681 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 336.000.000
3. Tanah Seluas 109 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 52.500.000
4. Tanah Seluas 4372 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 155.000.000
5. Tanah Seluas 215 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 301 m2/16.3 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, WARISAN Rp. 407.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **297.000.000**

1. MOTOR, HONDA ASTREA Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
4. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000



5. MOTOR, HONDA VARIO 150CC Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp.  
20.000.000

6. MOTOR, HONDA CBR 150 CC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.  
18.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 1.412.105

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

**Sub Total**

Rp. 2.703.912.105

**III. HUTANG**

Rp. 188.674.901

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 2.515.237.204

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.